

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan semakin hari semakin banyak diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus mengenai lemahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi topik permasalahan yang harus dikaji lebih dalam. Pemerintah masih terus berupaya melakukan perubahan dalam segala aspek demi tercapainya kemakmuran negara, terutama perubahan dalam mengelola laporan keuangan negara yang andal, akuntabel dan transparan (Lestari dkk, 2020).

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan. Undang-undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memerhatikan beberapa hal, antara lain : anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Eriani dkk, 2018).

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang berkualitas harus dapat disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari aspek karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal dan dapat dipahami serta dapat dibandingkan (Aprihani, 2016).

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu tanda laporan keuangan dianggap berkualitas adalah saat BPK memberikan opini wajar tanpa

pengecualian (WTP) kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi, standar akuntansi, pengendalian internal, dan pemahaman akuntansi serta pengalaman kerja sumber daya manusia yang ada. Laporan keuangan pemerintah daerah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Eriani dkk, 2018).

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Indrawan & Dewi, 2022). Pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah SKPK di kabupaten Aceh Jaya (Maulid dkk, 2022). Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan finansial OPD Kabupaten Karangasem (Wiratama & Andayani, 2022). Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Triono & Dewi, 2020). Pemahaman akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes se-Kabupaten Jembrana (Indrawan & Dewi, 2022). Secara parsial, tingkat pemahaman akuntansi pegawai tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan kota medan (Atika et al, 2019).

Laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas utama pemerintah yang memberikan informasi kepada pihak luar dan masyarakat mengenai sejauh mana efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi organisasi tersebut. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2004:105).

Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas publik (Halim dan Damayanti, 2007:20). Pengelolaan keuangan yang baik akan dapat dilihat dari laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada (Harun,

2009).

Salah satu kualitas laporan keuangan yang harus dicapai adalah masalah relevansi. Kata relevan mengacu kepada dampak dari informasi dan pengaruhnya kepada keputusan ekonomi para pemakai laporan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu sehingga informasi yang relevan dapat memberikan manfaat umpan balik dan prediktif. Kesalahan penyajian informasi dapat menyebabkan hasil laporan keuangan tidak akurat. (Rohmah dkk., 2020)

Perubahan akuntansi berbasis kas menjadi akrual bukan sekedar masalahteknis pencatatan transaksi dan menyajikan laporan keuangan, tetapi membutuhkan kebijakan akuntansi (accounting policy), perlakuan akuntansi untuksuatu transaksi (accounting treatment), pilihan akuntansi (accounting choice),serta mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Oleh sebab itu, proses pelaporan keuangan pemerintah harus dikerjakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai agar mampu menyusun dan menyajikan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang berkualitas (Eriani dkk., 2018).

Mengingat perkembangan kualitas laporan keuangan yang masih terlihat lambat, maka peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan peran pengawas keuangan serta efektivitas pengendalian intern pemerintah menjadi krusial. Terkait masalah pengendalian, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 60 tahun 2008, tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP). Dengan mengoptimalkan SPIP diharapkan pengendalian intern semakin efektif sehingga dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan rendahnya kuailtas informasi keuangan. Upaya peningkatan kualitas LKPD juga sejalan dengan inpres No. 4 tahun 2011, tentang percepatan peningkatan kualitas akuntanbilitas keuangan negara (Eriani dkk., 2018).

BPKP diberi tugas dalam salah satu instruksinya untuk melakukan asistensi kepada Kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat atau daerah dalam pengelolaan keuangan negara, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola. Pemeriksaan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran informasi laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Eriani dkk., 2018).

Berdasarkan LHPD tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan sebanyak 344 permasalahan sebesar Rp40.728,66 juta pada pemeriksaan laporan keuangan TA 2021 yang terdiri atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 164 permasalahan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 180 permasalahan sebesar Rp40.728,66 juta (BPK RI, 2023).

Pada tahun 2024 BPK kembali memberikan LHPD yang menyatakan, BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengungkapkan sebanyak 356 permasalahan sebesar Rp91.828,38 juta pada pemeriksaan laporan keuangan TA 2022 yang terdiri atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 129 permasalahan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 227 permasalahan sebesar Rp91.828,38 juta (BPK RI, 2024)

Sistem Informasi Akuntansi dan pengendalian internal berkaitan sangat erat karena kedua hal ini saling mempengaruhi, semakin baik sistem informasi akuntansi yang di terapkan maka pengendalian internalnya semakin berkualitas, kesuksesan penerapan sistem informasi akuntansi sangat berhubungan erat dengan individu yang mengoperasikan (user) sistem informasi tersebut. Penerapan sistem informasi dapat dinyatakan berhasil apabila individu yang mengoperasikannya (user) dapat memberikan manfaat kepada perusahaan serta berhasil untuk berkontribusi kompetensi mereka dalam penerapan sistem informasi akuntansi (O'Brien & Marakas, 2010).

Oleh karenanya peneliti menganggap bahwa kualitas SDM sangat penting untuk menghasilkan output yang berkualitas. Pemahaman Akuntansi dan Pengalaman Kerja merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi sehingga hal ini perlu untuk diteliti agar kedepannya pemerintah kota Jambi dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa adanya sedikit pun kelemahan. (Atika dkk, 2019).

Penelitian terkait variabel pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh (Eriani et al., 2018), (Lestari & Dewi, 2020), (Ratih Dewi Artatik et al., 2021), (Ahsani, 2018), (Aprihani, 2016), (Mardiana & Fahlevi, 2017), (Rohmah et al., 2020), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal sangat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun ada juga penelitian dari (Gustina, 2021), (S Purnomo, 2014), (Atharrizka dkk, 2021) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian mengenai variabel sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, (Lestari & Dewi, 2020), (Ayem & Amahala, 2023), (Widiastuti dkk, 2023), (Arza dkk, 2021), menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi tidak sejalan dengan (Emilianus Eo Kutu Goo & Paulus Libu Lamawitak, 2021), dan (Mahfuz & Hanum, 2023) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian I Gusti Ayu Ratih Dewi Artatik, Ni Wayan Alit Erlina Wati dan Putu Nuneik Hutnaleontina (2021), hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi variabel, Pada penelitian sebelumnya mengambil variabel pengaruh penerapan sistem pengendalian intern, pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan prinsip pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota badung, sedangkan penelitian ini mengambil variabel pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan pemahaman akuntansi sebagai variabel moderasi.

Dari uraian fenomena dan latar belakang di atas, masih terdapat inkonsistensi dari penelitian sebelumnya terhadap variabel independen dan variabel dependen maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti ulang lebih lanjut penerapan standar akuntansi pada Pemerintah Provinsi Jambi sehingga tertarik untuk meneliti ulang tentang: “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

dan Pemahaman Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi (Survey Pada Seluruh Dinas Pemerintah Provinsi Jambi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di sampaikan diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian, sebagai berikut :

1. Apakah Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah?
2. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah?
3. Apakah Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui Pemahaman Akuntansi?
4. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui Pemahaman Akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Untuk Memberikan Bukti secara empiris mengenai pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Untuk memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui Pemahaman Akuntansi.
4. Untuk memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui Pemahaman Akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Pemahaman Akuntansi.

2. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan pejabat pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif untuk melakukan pelaporan keuangan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang system yang baik digunakan dalam penyusunan laporan keuang